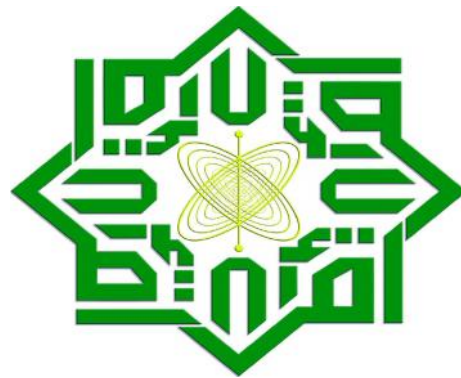


**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN  
2009 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NASRIZAL**  
**NIM. 10827003477**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, **Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Di Kabupaten Kuantan Singingi**. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan. Otonomi daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD dibidang Perizinan maupun sumbangan dari pihak pertambangan terhadap daerah, yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana perizinan dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk memantapkan Otonomi daerah luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran perizinan disini sangatlah penting karna dengan adanya izin berarti suatu kegiatan sudah ada yang melindungi yaitu pihak pemerintah selaku pemberi izin.

Masalah pokok yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan batubara serta faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan. keberhasilan dalam pemberian izin sangat berpengaruh terhadap lingkungan, karna dengan adanya izin yang resmi akan dapat meningkatkan keuangan daerah maupun Negara, serta tidak akan ada lagi tambang-tambang liar yang beroperasi yang menyebabkan rusaknya ekosistem alam dan lingkungan sekitar.

Melalui metode penelitian Hukum Sosiologis penulis mencoba untuk membahas permasalahan diatas dalam skripsi ini dengan meneliti mengenai pemberian izin, faktor penghambat UU No 4 tahun 2009 bentuk pelanggaran penambangan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sedangkan Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah dinas pendapatan daerah Kabupaten Kuantan 1 orang, Dinas sumber daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi Bagian Kepala Geologi Pertambangan Umum 1 orang, anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 1 Orang, Humas (perusahaan batubara) PT.Qausar Inti Nusantara 1 orang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, dan tokoh masyarakat. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Analisa yang penulis gunakan adalah analisa Deskriptif Kualitatif. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan induktif dan deduktif. sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara menggunakan teknik Sensus. Hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah populasi sehingga dalam memperoleh data yang Valid dan mewakili penelitian potensi dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwasanya peraturan tentang pemberian izin usaha pertambangan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tata cara pemeberian izin sudah aturan baku yang

dikeluarkan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sedangkan di Riau tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi izin diajukan Bupati Kuantan Singingi melalui Dinas Sumber Daya Mineral Dan Dinas Pendapatan Daerah Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanpa bertentangan dengan peraturan Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut. Pengajuan izin kegiatan pertambangan adalah ke dinas sumber daya mineral, dan pembayaran izin dilakukan oleh dinas pendapatan, sedangkan dalam pemungutan biaya izin dilakukan melalui media storan seperti karcis dan leges yang sah dikeluarkan dinas terkait.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberian izin tambang batubara belum begitu optimal karena tidak mengetahui Aturan, kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang yang baru, hal ini berdampak mengakibatkan kurangnya kesadaran dari pihak pertambangan dalam mengelola lingkungan.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak pertambangan adalah kerusakan lingkungan alam sekitar, adanya pencemaran aliran sungai, polusi udara, kebisingan diluar batas, timbangan tindih lahan dan sebagainya.

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN JUDUL**

### **HALAMAN PENGESAHAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	19
B. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi .....	25
C. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi .....	27
D. Tambangan Batubara Kabupaten Kuantan Singingi .....	27

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

A. Hakikat Menguasai Negara .....	29
B. Pengertian Perizinan .....	31
C. Macam Macam Perizinan.....	34

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prosedur dan Tata Cara Pemberian izin usaha Pertambangan Batubara di Kabupaten Kuantan Singingi.....	36
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Singing.....	43
C. Bentuk pelanggaran usaha kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Singingi.....	50

### **BAB V : KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I Daftar perusahaan Batubara di Kabupaten Kuantan Singingi.....	7
I.II. Daftar Bupati yang memimpin Kabupaten Kuantan Singingi sejak berdiri sampai sekarang .....	26

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan anugrah yang diberikan ALLAH kepada umatnya, oleh karena itu kita harus menjaganya dengan seksama, hal ini disebabkan oleh karena sumber daya alam itu bukan hanya untuk kehidupan pribadi kita saja, melainkan juga untuk kehidupan orang banyak dan cucu kita, apabila hal ini tidak diperhatikan terutama dibagian sumber daya energi dan pertambangan karena itu merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Mengatakan:

*“Bahwa Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat”.<sup>1</sup>*

Ketentuan pasal (33) ayat (3) UUD 1945, merupakan ketentuan hasil rumusan para pendiri Negara ini, secara esensi mempunyai “Roh” sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan itu mempunyai makna relegius. Makna relegius yang dimaksud adalah, adanya penegasan penguasaan Negara atas kekayaan alam, dimana hasil kekayaan tersebut, dan hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Dalam konteks agama Islam, makna Relegius tersebut, mempunyai hubungan timbal balik yang seimbang, yaitu bagi rakyat sebagai

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945

warga Negara, mempertahankan wilayah, Harkat Martabat, dan kehormatan Bangsa merupakan salah satu bentuk jihad.<sup>2</sup>

Dalam UU No.32 Tahun 2004 menjelaskan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah maka segala hal yang bersangkutan mengenai daerah diatur oleh daerah itu sendiri karena otonomi itu adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kepentingan daerah maka semua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang salah satunya tentang perizinan usaha pengelolaan pertambangan dan energi agar tercipta keseimbangan antara alam dan kelestarian lingkungan<sup>3</sup>.

Serta apabila dilihat dari kewenangan daerah setelah otonomi diberikan maka daerah berhak mengelolah secara mutlak, daerah memiliki hak mutlak untuk mengelolanya seperti dalam hal pemberian izin usaha pertambangan batubara yang tedapat didaerah tersebut, khusus pada otonomi daerah dewasa ini pemerintah dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota<sup>4</sup>.

Kemudian pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi, akan diwujudkan melalui berbagai bentuk peraturan peraturan yang berorientasi pada pendapatan asli daerah (PAD). Pengaturan pengaturan yang dimaksud biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan

---

<sup>2</sup> Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet.ke 1, jilid 1, h. 1

<sup>3</sup> Widjaja A.W, *Titik berat Otonomi*, (PT.Grafindo Persada,Jakarta, 1998) h. 80

<sup>4</sup> *ibid*



dan perda yang mengatur tentang izin usaha pertambangan. Namun demikian sesuai dengan asas hukum, peraturan daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pusat memberikan berbagai pengaturan sebagai *guide line* bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewenangan otonomnya.

Namun kenyataan ada yang menunjukkan bahwa kewenangan daerah yang demikian luas seringkali tidak dikelola secara cerdas dan miskin inovasi. Berbagai keluhan muncul berkenaan dengan menurunnya tingkat pelayanan dan daya saing daerah karena berbagai perizinan membebani pelaku ekonomi. Maksudnya adalah dengan banyaknya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum perizinan dilakukan yang membuat pelaku ekonomi (perusahaan, koperasi, dan perorangan) membangkang dan tidak mau patuh terhadap peraturan yang berlaku, maka hal ini mungkin yang menyebabkan banyaknya terdapat tambang-tambang liar.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sering kita junjung. Anggota DPR adalah wakil rakyat dimana dialah yang menampung Aspirasi atau segala keluhan yang terjadi di masyarakat dimana tempat pemilihan terpilihnya anggota DPR/DPRD tersebut. Maka disinilah Anggota DPR/DPRD adalah penyambung lidah rakyat atau kehendak rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah lah nantinya yang akan melihat langsung kelapangan dan hal apa saja yang harus dilakukan pemerintah daerah maupun pusat.

Peraturan tentang pertambangan batubara diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 yang mana Usaha pertambangan tentang pemberian izin terhadap pertambangan batubara yaitu diatur dalam Pasal 37 isinya:

Izin usaha pertambangan diberikan oleh:

1. *Bupati/walikota apabila WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;*
2. *Gubernur apabila WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
3. *Menteri apabila WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan adalah kajian terhadap perizinan usaha tambang batubara di daerah kabupaten kuantan singingi serta dalam proses pengurusan izin usaha pertambangan batubara. Seterusnya dilihat dari segi pengurusan apakah sulit, karena apabila penulis perhatikan masih ada terdapat tambang-tambang liar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, apakah ini merupakan penyebabnya oleh sebab itu penulis mengangkat tulisan ini yaitu bagaimana cara/pengurusan dalam membuat izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi, faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang No.4 Tahun 2009, dan bagaimana bentuk pelanggaran izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi, karena tambang batubara di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan prospek yang amat besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

---

<sup>5</sup> Pasal 37 UU No 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara

Pengurusan perizinan para pengusaha tambang batubara harus memiliki surat pendaftaran perizinan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pemberi izin, serta yang berhak sepenuhnya dalam pelaksanaannya, atau proses, cara perbuatan (Rancangan, Keputusan pemberian Izin) pada tambang batu bara dalam hal pemberian izin usaha pertambangan batubara.

Usaha pertambangan berdasarkan golongan jenis izin usaha /kuasa yang diberikan pada bidang pertambangan, kalau kita perhatikan bahwasanya barang tambang berdasarkan kegunaan dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

1. Bahan galian sumber tenaga atau golongan A, Contoh minyak bumi, Batubara, Gas, dll.
2. Bahan galian bijih atau golongan B, Terdiri dari bahan galian yang berasal dari logam contoh biji besi, tembaga, dll.
3. Bahan galian industry atau golongan C, Yaitu bahan galian bukan logam contoh semen, tambang pasir, mika, kwarsa , dll.<sup>6</sup>

Apabila dilihat dari pembagian jenis barang tambang batubara termasuk dalam golongan A yang mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 61 Tentang pertambangan Mineral dan batubara besarnya tarif izin usaha pertambangan untuk golongan A dan B adalah :

- (1) *Pemegang IUP (izin usaha pertambangan) Eksplorasi Batubara diberi WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan) dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.*

---

<sup>6</sup> Mement Nurachmat, *Lingkungan Sosial dan ilmu bumi*, ( Jakarata, Lazuardi putra Pertiwi,) cet ke 1, h. 64

- (2) *Pada wilayah yang telah diberikan IUP (izin usaha pertambangan) Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP (izin usaha pertambangan) kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.*
- (3) *Pemberian IUP (izin usaha pertambangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.<sup>7</sup>*

Penjelasan dan uraian diatas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jelas disini yang dipungut izinnya adalah yang sedang mengurus izin usaha pertambangan batubara sampai dalam tahap pengangkutan dan penjualan, dari pasal tersebut dijelaskan tahap-tahap yang dilalui dalam pengurusan izin sampai dalam tahap pengangkutan dan penjualan, adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Izin/kuasa pertambangan
2. Izin/kuasa pertambangan eksplorasi
3. Izin/kuasa pertambangan eksploitasi
4. Izin/kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian.
5. Izin/kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Tahapan diatas maka jelas setelah perusahaan itu diberi izin, setelah beroperasi dan menghasilkan maka, disinilah diatur tentang berapa tarif pemungutan pengurusan izin usaha sampai ketahap pengangkutan dan penjualan.

Kabupaten kuantan singingi termasuk daerah yang yang mempunyai potensi batubara dan banyak terdapat pertambangan batubara, hampir setiap kecamatan yang ada di Kabupten Kuantan Singingi mempunyai potensi batubara.

---

<sup>7</sup> Pasal 61 UU No 4 tahun 2009    ayat 4 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Adapun pertambangan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 10 pertambangan masih berlaku (aktif), tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, adapun pertambangan tersebut adalah :

**Tabel I.I**  
**Daftar Perusahaan Batubara Di Kabupaten Kuantan Sengingi**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Lokasi Penambangan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Nomor IUP</b>
1	PT Tri Bakti Sarimas 1	Pantai kec.kuantan mudik	198,2	179 tahun 2010
2	PT Tri Bakti Sarimas 2	Pangkalan Kec.Kuantan Mudik	198	180 tahun 2010
3	PT Tri Bakti Sarimas 3	Pangkalan Kec.Kuantan Mudik	98,5	181 tahun 2010
4	PT Manunggal Inti Artamas	Petai Kec.Singingi Hilir	1.937	kpts 163/vii/2011
5	PT Nusa Riau Kencana Coal	Pulau padang Kec.Singingi Hilir	719,4	183 tahun 2010
6	PT Quasar Inti Nusantara	Pangkalan dan ibul Kec.Kuantan Mudik	457,46	406 tahun 2010
7	PT Pabrik Komponen Industri	Cerenti Kec.Cerenti	9.822	184 tahun 2010
8	PT eka Manunggal Jaya	Sarosah Kec Hulu Kuantan	6.913	182 tahun 2010
9	PT Andalan Nusantara Permai	Situgal dan Giri Sako kec.Logas tanah darat	20.03	405 tahun 2009

10	CV Harisa Mulia Mandiri	Pangkalan Kec.Kuantan Mudik	182	407 tahun 2009
----	-------------------------	-----------------------------------	-----	-------------------

*Sumber : Dinas Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 10 perusahaan Batubara yang beroperasi dikecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari banyaknya perusahaan Batubara yang beroperasi memang menguntungkan bagi pihak pemerintah daerah maupun Provinsi atau pusat, karena akan meningkatkan keuangan Negara dengan penggalan sumber daya Alam tersebut, begitu juga warga tempatan akan mendapatkan Lowongan pekerjaan karna telah dibukanya sejumlah perusahaan Batubara. Namun disisi lain terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan pertambangan, yaitu dengan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pada dasarnya Pencemaran/kerusakan Lingkungan adalah merupakan asal mula terjadinya sengketa lingkungan antara tercemar (Korban Pencemaran) melawan Pencemar atau perusak (Pelaku Pencemaran/Kerusakan). Korban pencemaran lingkungan mempunyai hak “atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPH). Atas dasar hak tersebut maka korban pencemaran dapat menuntut pihak pencemar atas ganti rugi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mashuri, *Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan*, (Yogyakarta: Pustaka Salistra, 2010), h. 1

Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban memberikan ganti kerugian dan melakukan usaha-usaha mengatasi pencemaran akibat usaha pertambangan. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain.

Banyak kasus lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau pada rakyat umum biasa belum dapat memenuhi harapan keinginan korban dengan membayar sejumlah ganti rugi karena prosedur dan dasar aturan yang ada masih belum memberikan jaminan atau memberikan aturan khusus yang sesuai dengan kasus lingkungan.

Dalam kasus lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, bagian terbesar yang perlu diperhatikan adalah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Atas dasar kasus tersebut yang perlu dikaji apakah gangguan dapat dijadikan dasar melakukan tuntutan ganti rugi.

Dengan demikian kedudukan Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dengan penyelesaian sengketa lingkungan, dan juga mempunyai tanggung jawab dalam hal lingkungan terkena pencemaran dan/kerusakan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap lingkungan yang tercemar agar ditangani dipulihkan kembali sehingga menjadi berfungsi kembali, bukan mengurus masalah tuntutan

ganti rugi yang sifatnya sebagai urusan keperdataan, atau urusan pribadi antara masyarakat dengan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan masih banyak pertambangan batubara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dalam mengolah lingkungan, yang menyebabkan rusaknya lingkungan, ini dbuktikan dengan adanya limbah bekas pengolahan batubara, adanya lobang lobang hasil galian pertambangan yang tidak ditimbun kembali, tercemarnya aliran sungai di skitar usaha pertambangan, adanya polusi udara dan sebagainya. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu melakukan peninjauan terhadap lingkungan, sehingga dengan adanya peninjauan lingkungan tidak akan rusak, dan apabila ada pihak pertambangan yang melanggar peraturan maka akan bisa ditindak tegas, baik secara langsung maupun peringatan terlebih dahulu.

Semoga pembahasan tentang tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan serta dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dan ketentuan pidana atau sanksi administratif dalam kegiatan pertambangan di kabupaten kuantan singingi ini dapat memberikan gambaran dan mendorong pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar, serta penerapan penegakan hukum sehingga dapat mengurangi dampak negatif pertambangan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, dan meningkatkan dampak positif melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku pembangunan infrastruktur, pendapatan asli daerah (PAD), serta penggerak kegiatan perekonomian di sekitar lokasi pertambangan.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI “.**

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran yang di inginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis memfokuskan tentang pembahasan tentang Pemberian izin usaha pertambangan batubara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan dampak lingkungan terhadap kegiatan pertambangan. Segala bentuk kasus yang sama ditempat lain bukan bahasan dalam penelitian ini.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan batu bara menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan undang- undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Bagaimana bentuk pelanggaran usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ingin mencapai beberapa tujuan antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan batu bara menurut undang- undang nomor 4 tahun 2009 di kabupaten kuantan singingi?
- b. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran pertambangan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Tata Negara khususnya dalam pengkajian pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan batubara menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 di kabupaten kuantan singingi.
- b. Untuk menambah bahan ataupun informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama.

- c. Sebagai salah satu Syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu Difakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Suska Riau

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian maka disusun metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif artinya suatu penelitian yang bermaksud memberi gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 khususnya mengenai pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan daerah tambang batu bara, dan juga dimana dilaksanakan pemberian izin usaha pertambangan batubara khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan penambangan batubara yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3. Subjek dan objek penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah kapala bidang Geologi dan Pertambangan Umum Dinas Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Junaidi. Kasi Penagihan Izin Usaha Pertambangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah yaitu bapak Saptudis.SE, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsudin, SE, dan bagian humas salah satu PT Pertambangan batubara yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu PT.Quasar Inti Nusantara Bapak Adi, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu bapak Asmari, Sos, dan Salah seorang Tokoh masyarakat/ Warga tempatan disekitar PT.Quasar Inti Nusantara bapak Kombaruddin, sedangkan objek dalam penelitian adalah mengenai pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi dan dampak lingkungan terhadap usaha usaha kegiatan pertambangan.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan peneliti, dimana Populasi dalam penelitian ini adalah Kapala Bidang Geologi dan Pertambangan Umum Dinas Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi 1 orang, Kasi Penagihan Izin Usaha Pertambangan 1 orang, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 1 oarang, bagian Humas salah satu Perusahaan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi 1 orang, Badan lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi 1 orang, selanjutnya penulis mengambil sampel 1 orang orang Warga tempatan dan juga Tokoh Masyarakat disekitar

pertambangan Batubara di sekitar Wilayah perusahaan PT. Quasar Inti Nusantara Sehingga sampel penelitian berjumlah 6 orang.

Metode penentuan sampel untuk 6 orang sampel tersebut adalah dengan menggunakan teknik Sensus. Hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah populasi sehingga dalam memperoleh data yang Valid dan mewakili penelitian potensi dapat diminimalisir.

#### 5. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini, berdasarkan data yang terdiri dari:

##### a. Data primer

Sumber data Primer yaitu diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan, Dan Dinas Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi tentang bagaimana tata cara pemberian izin, Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan bagaimana bentuk pelanggaran usaha pertambangan batubara. Data ini merupakan data pokok yang dijadikan sebagai dasar dari penulisan ini.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis dari kepustakaan, dokumen dokumen, dan laporan laporan tertulis dari aparat terkait dan sebagainya guna mendapatkan teori teori pendapat dan tulisan para ahli.

#### 6. Alat Pengumpul Data

Penulis dalam penelitian ini mempergunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, sebab data observasi ini dipandang lebih asli, aktual, tidak subjektif, dan lebih akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian tentang pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan batubara dimana penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Geologi Dan Pertambangan Umum Dinas Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi 1 orang, Kasi penagihan izin usaha pertambangan 1 orang, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, bagian Humas salah satu perusahaan batubara (PT.Quasar Inti Nusantara) di Kabupaten Kuantan Singingi, badan lingkungan hidup (BLH) kabupaten kuantan singingi 1 orang dan salah seorang tokoh msyrakat/warga tempatan disekitar Wilayah PT.Quasar Inti Nusantara.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dimana penulis dalam mengumpulkan data melalui peraturan perundangan, peraturan daerah, Buku-Buku dan

Dokumen-Dokumen yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## 7. Analisis Data

Adapun metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yakni data yang terkumpul melalui studi dokumentasi, perpustakaan tak terlepas juga wawancara akan didiskripsikan sedemikian rupa kemudian data-data tersebut di analisis, baik melalui perbandingan data-data maupun menggunakan pendekatan Teori, konsep maupun para ahli.

Penulis mengambil kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dari data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum dari ketentuan perundang-undangan dan teori-teori yang ada.

## 8. Metode penulisan

- a. Metode induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan keterangan kemudian di analisa sehingga tersusun sebagaimana yang dikendaki dalam penelitian masalah ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi dalam :

**BAB I** :Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** :Gambaran umum kabupaten kuantan singingi, keadaan geografis Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, pariwisata.

**BAB III** :Tinjauan Teoritis penguasaan Negara dan Perizinan.

**BAB IV** :Bab ini meliputi pembahasan pemberian izin usaha pertambangan Batubara menurut undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pemberian izin usaha pertambangan batubara Di kabupaten Kuantan Singingi, yang membahas bagaimana tata cara pemberian izin usaha pertambangan batubara menurut undang undang nomor 4 tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi, faktor penghambat dalam pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 2009, dan bentuk pelanggaran kegiatan usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi.

**BAB V** :Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIR



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

### **KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi berada di bagian Selatan Propinsi Riau, pada 00 Lintang Utara - 10 Lintang Selatan dan 10102' – 101055' Bujur Timur. Kabupaten ini berada di area seluas 7656,03 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Di Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
2. Di Selatan berbatasan dengan Jambi.
3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat.
4. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 199 desa, dengan Taluk Kuantan sebagai ibukota Kabupaten. Selain Taluk Kuantan, kota penting lainnya adalah Lubuk Jambi, Muara Lembu, Benai, Baserah, Cerenti, Lubuk Ambacang, Kampung Baru, Kota Baru, dan Inuman. Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September – Februari, dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret – Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5 – 300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Total populasi penduduk

adalah 221.676 jiwa dengan kepadatan 28 orang per km<sup>2</sup>. Kebanyakan masyarakatnya adalah berasal dari suku Melayu dengan dialek yang hampir sama dengan dialek Minangkabau – etnis yang hidup di daerah Sumatra Barat. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar (75%) adalah bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.<sup>1</sup>

Adapun keadaan alam fasilitas dan pendukung lainnya adalah sebagai berikut :

### **1. Transportasi Kabupaten Kuantan Singingi**

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian Selatan Kabupaten ini, mengawali tahun fiskal 2000, maka telah dibuat jalan raya untuk lintas Selatan, sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki. Saat ini, beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten ini sudah dilalui oleh berbagai kendaraan. Jalan yang dilalui adalah 1.998, 26 km. Taluk Kuantan sebagai ibukota Kabupaten - merupakan jalur Barat Trans-Sumatera yang menghubungkan Jawa dengan kota lainnya di Sumatera, seperti Padang, Bengkulu, Palembang, Lampung, Medan, dan Aceh. Transportasi sungai yang menggunakan sungai Kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestic, khususnya untuk desa-desa terpencil yang ada di tepian sungai.

Dengan berdirinya Riau Airlines (RAL) sebagai Perusahaan yang bergerak di bawah naungan Pemerintah Riau, untuk kedepannya akan dibuka

---

<sup>1</sup> Kuantan Singingi dalam gambar, arsip Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006

penerbangan ke Kuantan Singingi, yang berlokasi di Kuantan Tengah dalam rangka membuka akses transportasi daerah ke Kabupaten ini.<sup>2</sup>

## **2. Listrik Kabupaten Kuantan Singingi**

Pembangkit listrik yang sudah ada saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 4180 MW. Selain itu, juga terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mampu untuk mencukupi kebutuhan listrik di Kabupaten ini – yang berpusat di Bukit Bertabuh, desa Lumbuk Ambacang, Kecamatan Kuantan Mudik. Yang terakhir akan dibuat pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga uap di daerah Cerenti, pada tahun 2004.

## **3. Telekomunikasi Kabupaten Kuantan Singingi**

Layanan PT Pos sudah mencakup ke seluruh bagian daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penduduk juga dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon, sementara telepon selular dapat dilayani di kota Taluk Kuantan.

## **4. Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi**

PDAM telah beroperasi di Taluk Kuantan, Lubuk Jambi, Benai, Pangean, Basrah dan Cerenti. Namun begitu, kebanyakan penduduknya tetap menggunakan air dari sumur dan sungai Kuantan untuk kegiatan rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> *ibid*

## **5. Fasilitas Pendukung Lainnya**

Sedikitnya terdapat 3 Bank komersial yang melayani aktifitas bisnis dan perdagangan di Kabupaten ini, yaitu : Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah Riau. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kuantan Singingi secara kontinu membangun infrastruktur dan fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan. Saat ini terdapat Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (11), dan Pusat Pelayanan Terpadu (60).

## **6. Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi**

Wisata Alam Kuantan Singingi meliputi :

- a. Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban di Lubuk Jambi.
- b. Air Terjun Guruh Gemurai.
- c. Wisata Alam Bukit Cokiak di Muara Lembu.
- d. Panorama Bukit Cokiak.
- e. Danau Kari Koto Kari.
- f. Dam Teso di Benai.

## **7. Wisata Petualangan Kuantan Singingi**

- a. Tambang Emas di Logas.
- b. Berakit di Sungai Singingi.
- c. Berakit di Pangkalan Indarung
- d. Hutan Lindung Bukit Bungkok dan Bukit Baling di Singingi.
- e. Gua Bunian di Bukit Kanua.
- f. Hiking dan Tracking di Bukit Batabuah.

## **8. Wisata Peninggalan Budaya dan Sejarah**

- a. Rumah Tradisional Tua Koto Rajo.
- b. Kompleks Candi Sangan.<sup>4</sup>

## **9. Pacu Jalur Kuantan Singingi**

Pacu Jalur merupakan festival terbesar untuk masyarakat yang berada di sepanjang sungai Kuantan setiap setahun sekali, untuk merayakan hari Kemerdekaan Indonesia. Pacu Jalur adalah perlombaan mendayung ‘kano’ yaitu semacam sampan yang terbuat dari kayu pohon sepanjang 25-40 meter, yang didayung oleh 50-60 orang. Sebelum acara dimulai, diadakan acara berupa tarian dan nyanyian untuk menghibur seluruh peserta dan masyarakat yang berada di Taluk Kuantan.

## **10. Perahu Baganduang**

Atraksi budaya dan perayaan masyarakat Kuantan ditandai dengan parade sampan tradisional yang dihiasi dengan berbagai ornamen dan warna - warna yang menarik.

## **11. Randai Kuantan**

Randai adalah sandi antara dengan seni bela diri dengan tarian yang diiringi musik tradisional. Biasanya pertunjukkan ini berlangsung semalaman dan menceritakan tentang legenda di daerah tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> *ibid*

## **12. Upacara Tradisional / Kerajinan seni**

Ada beberapa kerajinan yang dapat di jadikan buah tangan, seperti pahatan, tekat, suji,dan lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa upacara tradisional, seperti :

- a. Upacara pernikahan.
- b. Upacara Belian atau Bulian.
- c. Upacara sesajian.
- d. Pengobatan tradisional.

## **13. Beberapa Potensi Daerah Kuantan SingingiAgrikultur, Hasil Panen, dan Holtikultura.**

Sektor agrikultur masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Sebagai tambahan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol,dan tomat.

## **14. Perkebunan Kuantan Singingi**

Ada beberapa hasil penting yang ada di daerah Kuantan Singingi, seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya. Sumber potensial di sector kehutanan antara lain :

- a. Produksi hutan terbatas : 316.700 ha.
- b. Hutan konversi : 450.00 ha.
- c. Hutan lindung : 28.000 ha.

## 15. Pertambangan Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yang termasuk kepada komoditas batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, emas, dan kaolin.

## 16. Industri di Kuantan Singingi

Beberapa bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu :

- a. Industri minyak sawit.
- b. Industri lempengan karet.
- c. Industri perabotan.
- d. Industri pengolahan makanan tradisional.
- e. Industri rumah tangga.

Beberapa Bidang yang Potensial untuk Investasi;

- a. Pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.
- b. Pengembangan kesuburan tanaman.
- c. Pengolahan air bersih.
- d. Pengembangan infrastruktur transportasi.<sup>6</sup>

## B. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari [Kabupaten Indragiri Hulu](#), setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 [kabupaten](#) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Taluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H.

---

<sup>6</sup> *ibid*

Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan.<sup>7</sup>

**Tabel I.II**  
**Daftar Bupati yang memimpin Kabupaten Kuantan Sengingi**  
**sejak pertama berdiri sampai sekarang:**

No.	Nama	Masa jabatan	Keterangan
1.	Drs. H. Rusdji S Abrus	1999 s/d 2001	Sebelumnya pejabat bupati kemudian menjadi bupati definitif
2.	Drs. H. Asrul Ja'afar	2001 s/d 2005	Sebelumnya menjadi wakil bupati kemudian menggantikan bupati yang meninggal dunia
3.	H. Sukarmis	2006 s/d sekarang	Jabatan periode ke dua

*Sumber : Dinas informasi dan komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi*

---

<sup>7</sup> *ibid*



### C. Penduduk kabupaten kuantan singingi

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis [Minangkabau](#) yang merupakan suku asli Kuantan, diikuti oleh [Suku Melayu](#) yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal [Jawa](#) yang banyak tersebar di daerah sentral-sentral transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.<sup>8</sup>

### D. Tambangan Batu Bara Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut data kuansing dalam tahun 2011 kandungan Batu Bara di kabupaten kuantan singingi adalah sekitar 153.217.627 Ton. Daerah atau lokasi yang memiliki potensi ini adalah :

1. Desa Petai (Kecamatan Singingi Hilir) dengan potensi 3.000.000 Ton
2. Desa Bukit Medang (Kecamatan Hulu Kuantan) dengan potensi 11.313.900 Ton
3. Desa Pangkalan (Kecamatan Kuantan Mudik) dengan potensi 6.453.691 Ton
4. Desa Sungai Jernih (Kecamatan Kuantan Hilir) dengan potensi 6.500.000 Ton
5. Desa Pulau Bayur (Kecamatan Cerenti) dengan potensi 66.000.000 Ton

---

<sup>8</sup> Arsip dinas kependudukan kabupaten kuantan Singingi tahun 2006.

6. Desa Pangkalan Indarung (Kecamatan Singingi) dengan potensi 20.056.000 Ton
7. Desa Lubuk Buntal (Kecamatan Pangean) dengan potensi 18.546.721 Ton
8. Desa Ibul (Kecamatan Kuantan Mudik) dengan potensi 21.347.215 Ton.<sup>9</sup>

Dari data diatas bahwasanya batubara kabupaten kuantan singingi sudah bisa dikembangkan kearah industri pertambangan dan industri yang memanfaatkan batubara sebagai sumber energi. Secara umum jenis batubara sudah dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Jenis Batubara

Bataubara golongan High Volatile A-B bitu minous non coking coal-non agglomerating jumlah cadangan : 264.000.000(tereka)

2. Tingkat pemanfaatan

Belum terlalu memanfaatkan, dan ada sebagian daerah yang telah memanfaatkan.

3. Arah pemanfaatan

Sebagai pembangkit tenaga listrik, PLTU (pembangkit listrik tenaga uap), digunakan sebagai industri kimia, industri kecil, rumah tangga dan transportasi.

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwasanya tambang batubara kabupaten kuantan singingi telah memanfaatkan walaupun belum dimanfaatkan secara maksimal dan efisien.

---

<sup>9</sup> Arsip Dinas Sumber daya Mineral ( *keadaan dan potensi batubara di Kabupaten Kuantan Singingi* ) tahun 2006.

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS HAKIKAT MENGUASAI NEGARA DAN PERIZINAN**

#### **A. Hakikat Menguasai Negara**

Tuntutan atas muatan undang-undang pertambahan yang harus lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan daerah, merupakan hal yang wajar dan dapat dipahami, karena dijamin oleh konstitusi Negara, persisnya oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan pasal 33 ayat 3 tersebut, mengandung roh yang menegaskan, bahwa kekayaan alam yang terdapat di wilayah hukum Indonesia harus dipergunakan hanya dan hanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Roh pasal 33 ayat 3 mengandung tiga unsur makna, yaitu:

1. Unsur bumi dan kekayaan alam, baik kekayaan alam yang di permukaan maupun di bawah tanah sebagai objek.
2. Unsur Negara sebagai subjek.
3. Unsur rakyat sebagai objek sekaligus subjek atau sasaran dari pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam<sup>1</sup>.

Lebih lanjut, uraian tiga unsur tersebut mempunyai makna:

1. Bahwa seluruh kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dikuasai oleh Negara, artinya setiap orang, kelompok, lembaga atau badan usaha apabila mengambil kekayaan alam, memanfaatkan dan menikmati kekayaan alam tersebut, tanpa seizin Negara masuk dalam wilayah perbuatan

---

<sup>1</sup> Nandang Sudrajat, *Op.cit* h.15

melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga dapat dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Kekayaan alam merupakan objek dari Negara, karena kekayaan alam khususnya sumber daya bahan galian dikuasai oleh Negara. Dengan demikian Negara sebagai subjeknya Negara sebagai penguasa. Penguasa melekat di dalamnya kekuasaan dan kewenangan.
3. Rakyat dalam konteks pengelolaan kekayaan alam khususnya sumber daya mineral menempati 2 posisi yaitu:
  - a) Rakyat dalam kedudukannya sebagai objek, yaitu rakyatlah yang pertama-tama menjadi sasaran utama menerima manfaat dan hasil kekayaan alam, guna mencapai taraf kehidupan sejahtera dalam arti luas, yaitu rakyat memperoleh jaminan sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain lain, yang salah satunya dibiayai dari hasil kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia.
  - b) Rakyat dalam kedudukannya sebagai subjek, yaitu rakyat mempunyai hak yang sama dengan lembaga usaha lain, dalam mengelola bahan galian sekaligus memanfaatkannya secara bijaksana. Wujud konkret rakyat dalam memanfaatkan atas bahan galian dimaksud, adalah rakyat diberikan kesempatan untuk ikut mengusahakan bahan galian yang ada, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek teknis penambangan yang baik dan keseimbangan lingkungan atau berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid* h.17

## B. Pengertian Perizinan

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan. Dengan demikian pemerintah mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, izin tidak sama dengan pembiaran, kalau ada suatu aktifitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukanlah merupakan izin, untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstituti dari aparat yang berwenang menerbitkan izin<sup>3</sup>.

Dalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan yang merupakan legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian izin tersebut melihat adanya penekanan pada izin tertulis, yakni terbentuknya dokumen, sehingga yang dimaksud sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan<sup>4</sup>.

Tujuan perizinan adalah dengan melalui perizinan pemerintah terlibat dalam kegiatan warga Negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrument yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk

---

<sup>3</sup> Sri Pudiyo, *perizinan problem dan upaya pembenahan*, ( Bandung, rezki press, 2007) h. 8

<sup>4</sup> Sri Pudiyo, *ibid*

terlibat dalam kegiatan masyarakat bahkan tidak berhenti pada satu tahap melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diharapkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrument masyarakat.

Tujuan pemerintah untuk memberlakukan sistem perizinan adalah :

1. Keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Mencegah bahaya terhadap lingkungan.
3. Untuk melindungi objek-objek tertentu.
4. Membagi benda-benda yang sedikit seperti pengelolaan terhadap pertambangan dan pengeluaran surat izin pertambangan daerah dan rakyat.
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dalam melaksanakan aktivitas.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari atas larangan, persetujuan, yang merupakan dasar pengecualian, dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin<sup>5</sup>.

#### 1. Larangan

Larangan dan wewenang suatu organ pemerintah dilakukan dengan memberikan izin harus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ini menimbulkan asas legalitas dalam negara hukum demokratis, yang dalam hal ini pemerintah hanya memiliki wewenang –wewenang yang tegas diberikan kepadanya dalam undang-undang dasar atau undang-undang lainnya, larangan itu

---

<sup>5</sup> Sri Pudiyo, *ibid*

merupakan sesuatu yang membebani warga, oleh karena itu pembebana tersebut mesti mendapatkan persetujuan warga dengan mendsarakan peraturan perundang-undangan.

## 2. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin)

Izin muncul apabila norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum, yang diberikan kepada sesuatu organ pemerintahan wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tatusaha Negara. Keputusan ini adalah keputusan sepihak dari sesuatu organ pemerintah yang diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatatusahaan untuk menciptakan suatu keadaan yang kongkret dan individual sehingga suatu hubungan hukum menetapkan secara mengikat, membebaskannya, atau dalam kondisi tertentu suatu permohonan itu ditolak.<sup>6</sup>

Dalam pemberian izin terhadap tambang batubara dikabupaten kuantan singingi termasuk dalam wewenang pemerintah daerah sebagai mana diuraikan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembahagian antar pemerintah propinsi, pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah pusat. Dalam pemberian izin dikabupaten atau kota diatur dalam sejumlah peraturan daerah yang ada dikabupaten/ kota ada ditangan bupati atau walikota, sedangkan sejumlah peraturan yang lain kewenangan penanganan izinnya disarankan kepada instansi teknis. Tentu saja, instasi teknis ini yang berwenang memproses menerbitkan. Ada pula yang sudah terpusat, artinya kewenangan penanganan

---

<sup>6</sup> Sri Pudiyatmo, *ibid* h.17

permohonan sampai penerbitan dipusatkan pada satu instansi dengan adanya pelimpahan kepala daerah kepada dinas yang menangani tentang perizinan ini.

Pada saat sekarang sistem pemerintahan mulai tertata rapi, perizinan disegala bidang pun mulai diatur dengan rapi dan sistematis, pada zaman sekarang setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, aturannya akan berbeda beda di setiap daerah hal ini disebabkan karena adanya kewenangan daerah dalam pengaturan tentang perizinan di suatu daerah.<sup>7</sup>

Dalam pemberian izin usaha terdapat beberapa golongan salah satunya pemberian izin terhadap pertambangan termasuk kepada perizinan tertentu, yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, penegndalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam lingkungan<sup>8</sup>.

### **C. Macam-Macam Perizinan Pertambangan**

#### **1. Izin Usaha Pertambangan (IUP),**

Adalah legalitas pengelolaan dan penusahaan bahan galian yang diperuntukkan baik swasta nasional, maupun badan usaha asing kopersai dan perseorangan dan disebut juga izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

---

<sup>7</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perizinan*, ( Yogyakarta, pustaka yustitusia, 2009) cet. 1, h. 8

<sup>8</sup> *ibid*



## 2. IUP Eksplorasi

Adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

## 3. Izin usaha produksi

Adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

## 4. Izin pertambangan rakyat

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

## 5. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

Adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

## 6. Izin usaha pertambangan khusus eksplorasi(IUPK Eksplorasi)

IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

## 7. Izin usaha pertambangan khusus(IUPK)

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nandang Sudrajat *op.cit* h. 73

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 DIKABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

#### **A. Prosedur Dan Tata Cara Pemberian izin usaha pertambangan Batubara di Kabupaten Kuantan Singingi**

Tahapan yang dilakukan oleh pihak pertambangan sebelum melakukan usaha/kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut :

##### **1. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan**

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan

Salah satu pertambangan yang terbesar di kabupaten kuantan singingi adalah pertambangan Batubara, dalam pengelolaan izin tambang batubara di Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, Yang mana izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh bupati kuantan singingi melalui dinas sumber daya mineral dan selanjutnya dikeluarkan bupati Kuantan Singingi melalui dinas pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin usaha tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur

dari jenis izin yang diberikan. Sesuai dengan UU No 4 tahun 2009 pasal 36 ayat 1 (a,b) menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan dua tahap yaitu:

- a. *IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;*
- b. *IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan<sup>1</sup>.*

Adapaun syarat- syarat yang harus dipenuhi pihak badan usaha, koperasi dan perorangan sesuai dengan pasal 39 UU No 4 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;

---

<sup>1</sup> Pasal 36 ayat 1 UU No 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara

- l. penyelesaian perselisihan;
  - m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. Amdal.
2. IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. Nama perusahaan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu berlakunya IUP;
  - h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. penyelesaian masalah pertanahan;
  - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
  - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
  - l. perpanjangan IUP;
  - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - o. perpajakan;
  - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;

- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal diatas penulis berpendapat bahwa syarat-syarat untuk mengajukan izin pertambangan terlalu banyak persyaratannya, sehingga para pihak pertambangan atau pun masyarakat yang ingin mengajukan izin pertambangan akan bingung. Alangkah lebih baiknya syarat-syarat tadi dikurangi dan tidak keluar dari ketentuan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum dan perturan perundangan yang telah dibuat. Menurut penulis apabila syarat tersebut sudah dikurangi dan diperjelas maka otomatis tidak akan membingungkan atau mempermasalahkan syarat yang bnyak tadi, dengan demikian pihak pertambangan akan mengerti hak dan kewajibannya, dan mungkin saja akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dibidang izin usaha pertambangan batubara.

---

<sup>2</sup> Pasal 39 Ayat 1 dan 2 UU No 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara

## 2. Pengajuan Permohonan Izin

Sebelum perusahaan melakukan kegiatan pertambangan adapun yang memberikan Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Sedangkan batasan wilayahnya Izin Usaha Pertambangan setiap perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. Untuk wilayah Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
3. Bupati/walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

---

<sup>3</sup> Pasal 39 UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Selanjutnya Dalam pelaksanaanya dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya dinas sumber daya mineral atas nama pemerintahan (Bupati Kuantan Singingi) daerah Kabupaten Kuantan Singingi hanya berhak untuk memberikan izin terhadap perusahaan yang akan melakukan kegiatan pertambangan batubara dikabupaten kuantan singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwasanya penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terutama tambang batubara kabupaten kuantan singingi sudah aturan baku tetapi kenyataannya perusahaan yang melakukan penambangan Batubara maupun masyarakat tempatan di Kabupaten Kuantan Singingi masih ada yang melakukan penambangan secara laiar baik itu pertambangan batubara maupun pertambangan emas secara illegal hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah atas peraturan perundangan yang berlaku.

Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap setiap Undang-Undang yang dikeluarkan kepada masyarakat agar dapat menekan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kerusakan alam maupun pencemaran lingkungan air dan tanah. Perizinan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh badan usaha ,koperasi maupun perorangan. Dari hasil wawancara penulis dengan dinas sumber daya mineral tgl 21 mei 2012 Narasumber memaparkan kepada penulis, bahwa setelah syarat telah dipenuhi oleh perusahaan batubara, maka perusahaan untuk segera mendaftarkan izin usaha pertambangannya kepada dinas sumber daya mineral atas nama bupati

Kuantan Singingi, dengan ketentuan yang pembayaran izinnya disetorkan ke dinas pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal diatas dari hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa setelah dikelurkannya UU No 4 Tahun 2009 dan dicabutlah perda No 2 tahun 2003 tentang retribusi dan energi oleh Menteri dalam negeri pada tahun 2009 yang bertepatan dengan lahirnya UU No 4 Tahun 2009. Walaupun perda tersebut sudah dicabut izinnya tetap diajukan ke dinas sumber daya mineral kabupaten kuantan singingi sedangkan tarif perizinannya di setorkan ke dinas pendapatan, antara dinas sumber daya mineral dan dinas pendapatan tidak dapat dipisahkan, karena kedua satuan kerja itu mempunyai kewenangan dalam proses pemberian izin usaha yang telah diberi Mandat oleh bupati selaku Kepala Daerah dan gubernur mau pun Menteri dalam Negeri sesuai peraturan perundangan.

### **3. Jangka Waktu Perizinan Pertambangan**

Dalam pasal 42 ayat 4 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa jangka wktu perizinan usaha pertambangan adalah :

“IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun”. Sedangkan

Jangka waktu IUP produksi diatur dalam pasal 47 ayat 5 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menyatakan :

---

<sup>4</sup> Junaidi, Wawancara (*kepala bidang geologi dan pertambangan umum dinas SDM*)  
21 Mei 2012



IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

## **B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Di Kabupaten Kuantan Singingi**

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 di kabupaten kuantan singingi yaitu sebagai berikut :

### **1. Tidak Mengetahui Aturan**

Dari penelitian yang dilakukan bahawasanya pengawasan terhadap keberhasilan pemberian izin usaha pertambangan batubara di kabupaten kuantan singingi belum begitu optimal dan maksimal seperti yang diinginkan, karena masih banyaknya badan usaha maupun msyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 serta tidak mengetahui aturan aturan yang terkandung dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009

---

<sup>5</sup> Pasal 42 UU No 4 tahun 2009 ayat 4 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, faktor yang utama penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yaitu sangat dirasakan oleh dinas pendapatan. Dari penjelasan yang diberikan oleh KASIE Penagihan izin usaha pertambangan Daerah Dinas Pendapatan kabupaten kuantan singingi, berdasarkan wawancara tanggal 22 Mei 2012, serta kenyataan yang ditemui penulis lapangan menunjukkan bahwa, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “Apakah faktor penghambat dalam menerapkan/pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 di kabupaten kuantan singingi khususnya bagi dinas pendapatan ?

Adapun jawaban dari Nara sumber adalah diatas adalah sebagai berikut : Disebabkan oleh karena masih banyak pihak perusahaan pertambangan ataupun masyarakat yang tidak mengetahui aturan yang terkandung dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009, yang menyebabkan kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan dalam membayar izin usaha pertambangan batubara, Ini merupakan tantangan bagi dinas pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi semoga dengan hambatan yang ada dapat memacu dinas pendapatan daerah untuk mencari solusi agar para perusahaan tau akan kewajibannya.<sup>6</sup>

## **2. Kurangnya Sosialisasi**

Selain itu juga faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yaitu masih kurangnya sosialisasi terhadap badan usaha, koperasi dan perorangan maupun masyarakat, sehingga 3 elemen diatas hanya mengetahui kewajibannya dan mereka tidak mengetahui semua haknya, karena setiap

---

<sup>6</sup> Saptudis, Wawancara (kasi dinas pendapatan daerah) 22 Mei 2012

pelaksanaan pemungutan pemeberian izin usaha dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Tanpa memberikan keterangan tentang hak yang didapat pihak badan usaha, koperasi dan perorangan, yang mereka ketahui hanya sedikit atau sekilas tentang izin dalam penambangan. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah mensosialisasikan segala peraturan perundangan maupun Perda sehingga pendapatan dibidang izin usaha pertambangan bisa menjadi lebih baik serta mambantu pertumbuhan ekonomi kuantan singingi dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.<sup>7</sup>

Selain dinas pendapatan daerah penulis juga mewawancara dinas pertambangan dan sumber daya mineral kabupaten kuantan singingi, berdasarkan wawancara pada tanggal 21 mei 2012 dengan Kepala Bidang Geologi Pertambangan yaitu dengan mengajukan pertanyaan: “apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 diakabupaten kuantan singingi ?

Adapun jawaban narasumber adalah hampir sama dengan dinas pendapatan, yaitu adanya penunggakan pembayaran izin usaha pertambangan, operasi produksi, eksplorasi dan eksploitasi, seperti yang dilakukan Pt.Quasar Inti Nusantara, maka dinas pertambangan dan sumber daya mineral langsung mencabut izin kegiatan penambangan, selanjutnya apabila izin sudah dicabut pertambangan tadi tidak boleh melakukan kegiatan penambangan. Dan apabila pihak pertambangan ingin melakukan kegiatan produksi pertambangan maka pihak pertambangan harus membayar denda dan izin pertambangan melalui dinas

---

<sup>7</sup> *Ibid 23 mei 2012*

pertambangan dan sumber daya mineral, dan membayar uang denda ke dinas pendaptan daerah kabupaten kuantan singingi. Apabila perusahaan yang bersangkutan sudah membayar denda barulah kegiatan pertambangan boleh dilaksanakan, dan ditandai dengan dikeluarkan kembali surat tentang izin kegiatan produksi kembali.<sup>8</sup>

Begitu juga dengan hasil wawancara dan apa yang dipaparkan salah seorang anggota DPRD kabupaten kuantan singingi pada tanggal 24 mei 2012, yaitu dengan mengajukan pertanyaan : Sejauh manakah pihak pertambangan atau masyarakat mengetahui Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Adapun jawaban Nara sumber yaitu: Bahwa diantara Undang-Undang dan Perda yang ada, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang maupun Perda-Perda yang ada di Kabupeten Kuantan Singingi ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, begitu juga dengan perda No 2 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang bahasan batubara, akibatnya banyak penambangan liar, dan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pemungutan izin usaha pertambangan.<sup>9</sup>

Peraturan perundangan yang sudah disetujui dan disahkan oleh menteri dalam negeri kemudian wajib disebarluaskan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Kemudian dimuat dalam lembaran daerah dan berita daerah, ini dilakukan oleh sekeretaris daerah, dari sinilah mulai disosialisasikan kepada

---

<sup>8</sup> .Junaidi, Wawancara (kepala geologi pertambangan umum dinasSDM) 21 mei 2012

<sup>9</sup> Syamsudin, Wawancara (Anggota DPRD kabupaten kuantan singingi ) 24 mei 2012

warga masyarakat supaya mereka juga mengerti tentang peraturan perundangan maupun perda yang telah dibuat dan supaya mereka mentaati peraturan tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat Indonesia ternyata masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang (UU) atau pun peraturan daerah (perda). Hal itu disebabkan dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan UU perlindungan konsumen dan juga keterbatasan masyarakat untuk mengetahui adanya UU tersebut. Karena banyak masyarakat yang tidak tahu dan kurang peduli akan UU atau perda. akibatnya banyak masyarakat yang seenaknya melanggar aturan dan ujung-ujungnya berurusan dengan pihak polisi.<sup>10</sup>

Terkait dengan hal diatas, sosialisasi merupakan unsur yang terpenting setelah keputusan peraturan daerah ditetapkan, DPRD dan Pemerintah ikut serta dalam mensosialisasikan peraturan daerah.

Menurut pandangan penulis sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan apabila pemerintah ingin mengeluarkan Undang-Undang maupun Peraturan daerah, karena dengan adanya sosialisasi msyarakat akan mengetahui, hak dan kewajibannya. Jadi apabila sosialisasi telah diberlakukan maka akan mengurangi adanya pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang dan Perda yang telah diberlakukan.

---

<sup>10</sup> [http//.www.UU dan PERDA.Com](http://www.UU dan PERDA.Com)

### 3. Kurangnya Kesadaran

Selain faktor yang 2 diatas faktor penghambat yang ke-3 adalah kurangnya kesadaran baik masyarakat maupun pihak perusahaan pertambangan untuk mentaati undang-undang, peraturan daerah dan peraturan yang lainnya.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru dari oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Misalnya orang yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila kesadaran hukum itu telah ada namun kemudian menurun bahkan hilang karena faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan tauladan dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *kesadaran hukum*, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2007) cet,ke-3 h.65

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, selain faktor tidak mengetahui aturan-aturan dan kurangnya sosialisasi, factor yang berikutnya adalah kurangnya kesadaran subjek retribusi, pihak perusahaan dan masyarakat.

Menurut pernyataan dari dinas pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi selain dari paktor adanya pihak perusahaan dan masyarakat yang tidak mengetahui aturan dan kurangnya sosialisasi, faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran pihak perusahaan dan masyarakat terhadap peraturan perundangan dan perda yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, namun pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi selalu berusaha agar kedepannya pihak perusahaan dan masyarakat agar sadar hukum dan mengetahui kesadaran agar menaati perturan-peraturan undang-undang dan perturan lainnya yang ada.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan hal diatas, bahwa kesadaran sangatlah penting bagi pihak perusahaan atau pun masyarakat untuk terlaksananya peraturan yang telah dibuat dan dikeluarkan pemerintah, karena dengan begitu akan dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran pemungutan izin usaha pertambangan batubara baik bagi pihak perusahaan dan juga bagi pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya kesadaran bagi pihak perusahaan dan msyarakat maka mungkin tidak akan ada lagi penyimpangan pihak perusahaan dalam pembayaran izin usaha, tidak ada lagi kerusakan lingkungan dan begitu juga peyimpangan yang dilakukan oleh petugas dalam mnerbitkan izin maupun dalam hal pemungutan izin produksi, eksploitasi dan eksplorasi.

---

<sup>12</sup> Syamsudin, Wawancara (*Anggota DPRD kabupaten kuantan singingi* ) 24 mei 2012

### **C. Bentuk Pelanggaran Usaha Kegiatan Pertambangan Batubara Dikabupaten Kuantan Singingi**

Di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini banyak terdapat kegiatan pertambangan batubara. Ada penambang batubara KP berskala besar dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ada pula pertambangan berdasarkan KP berskala kecil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Wilayahnya meliputi hampir seluruh kecamatan di kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan yang berskala besar tersebut mempunyai lahan yang luas sedangkan yang berskala kecil dikeluarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Untuk lebih rinci penulis akan memaparkan apa saja bentuk pelanggaran izin yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha (perusahaan batubara), maupun masyarakat adalah sebagai berikut :

#### **1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Sejak aktivitas perusahaan pertambangan pada tingkat eksploitasi telah menimbulkan dampak lingkungan yang berakibat banyaknya komplain lingkungan dari masyarakat yang terkena dampak di sekitar areal pertambangan kepada perusahaan pertambangan.

Kasus-kasus komplain masyarakat terhadap perusahaan tambang batubara tersebut berkaitan dengan masalah pencemaran atau kerusakan dan atau gangguan lingkungan yang berupa perubahan lingkungan secara fisik, kimia dan biologi (tanah, air, udara, dan tanaman) yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan tersebut yang dikaitkan dengan aktivitas penambangan.



Kegiatan penambangan batu bara merupakan sumber daya energi yang tidak terbarukan, terutama dalam hal eksploitasi yang sifatnya eksklusif. "Di banyak tempat, masyarakat lokal justru menjadi pihak termarginalkan. Dan di banyak kasus, justru masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat langsung dari hasil kegiatan. Belum lagi kecemburuan sosial akibat kontrasnya perbedaan pendapatan antara karyawan, terutama di dalam kompleks dan di luar," bebernya. Permasalahan lain yang seringkali menjadi sumber konflik, adalah permasalahan pembebasan lahan dan ganti ruginya.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 21 mei 2012 dengan Kepala Bidang Geologi Pertambangan yaitu dengan mengajukan pertanyaan: "apakah permasalahan yang utama penyebab rusaknya lingkungan akibat usaha pertambangan?"

Adapun jawaban narasumber adalah Permasalahan utama dampak kegiatan penambangan batubara terhadap lingkungan dapat dikelompokkan menjadi enam isu pokok, yaitu air asam tambang, rehabilitasi lahan, hidrokarbon, kualitas air, kualitas udara dan konflik sosial budaya.

"Keenam permasalahan tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak lingkungan secara luas. Aktivitas pertambangan yang dihubungkan dengan kualitas lingkungan sangat perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menjamin keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> .Junaidi, Wawancara (kepala geologi pertambangan umum dinasSDM) 21 mei 2012

Dengan adanya kerusakan lingkungan maka disinilah peran gubernur untuk mengawasi kegiatan pertambangan di wilayah propinsi, yaitu kabupaten kota yang dia pimpin yang terdapat usaha pertambangan batubara tersebut, Karena itu Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa menggunakan kewenangannya untuk menertibkan tambang yang melanggar aturan.

Gubernur mempunyai kewenangan setelah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi. Melalui PP ini sebenarnya Gubernur telah diberi 'pedang' untuk dimanfaatkan agar bisa menata keadaan menjadi baik.

Terkait masalah diatas penulis berpendapat bahwa Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah memiliki wewenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran sumpah/janji.

Dalam kaitan dengan penertiban perusahaan tambang batubara yang ijinnya diterbitkan bupati/walikota. untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya sesuai PP Nomor 19 tahun 2010. Karena itu jangan dibiarkan lagi ada perusahaan tambang batubara yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu juga dilakukan Penertiban terhadap perusahaan tambang batubara yang arealnya sangat berdekatan dengan pemukiman warga. Ini perlu dilakukan untuk menghindari musibah tanah longsor dan banjir.

Implikasi dari UU Otonomi Daerah (Otda) (UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah) telah menyebabkan Bupati merasa memiliki hak seluas-luasnya terhadap daerah hingga mengakibatkan banyaknya IUP yang menimbulkan tumpang tindih lahan pertambangan.

Selain kerusakan lingkungan negara kita kehilangan aset dan prospek keuntungan, kehilangan pendapatan negara dari pajak dan mungkin juga royalti karena cukup banyak IUP yang menggelapkan pajak. PAD bagian daerah juga tidak jelas kalau bisa mereka akan kurangi biaya dan manipulasi pajak oleh IUP.

## **2. Sanksi bagi yang merusak lingkungan akibat usaha pertambangan batubara di Kabuapten Kuantan Singingi.**

Pihak pemerintah Kabupaten Kuantan singingi akan menegur, memberi sanksi dan mempidanakan perusahaan tambang Batubara apabila tidak melakukan reklamasi atau disebut dengan memperbaiki lingkungan yang rusak akibat usaha pertambangan.

Hasil wawancara dengan dinas sumber daya mineral kabupaten kuantan singingi kepala geologi pertambangan umun, dengan mengajukan pertanyaan

Apakah sanksi dan tindakan pemerintah daerah apabila IUP telah dicabut tetapi pihak pertambangan tidak melakukan perbaikan lingkungan?

Adapun jawaban narasumber adalah kemungkinan akan kami tindak lanjuti hingga ke proses hukum karena dinilai tidak melakukan upaya perbaikan pasca pencabutan Izin Usaha Pertambangan ungkap Kepala Badan geologi Pertambangan Umum Dinas Sumber Daya Mineral. Namun pihak Pemda Kabupaten Kuantan Singingi masih memberi kesempatan kepada perusahaan

tambang batubara apabila masih belum ada perbaikan lingkungan maka untuk segera memperbaiki lingkungan yang rusak maupun tercemar oleh kegiatan pertambangan. Perusahaan itu sebenarnya sudah melakukan proses perbaikan lingkungan tetapi kami nilai sangat lambat sehingga jika dalam batas waktu tertentu belum menyelesaikan reklamasi itu maka akan kami lanjutkan ke proses hukum. Perusahaan tambang batubara yang izinnya telah dicabut tetap wajib melakukan reklamasi hingga pada tahap reboisasi atau penghijauan kembali.

Jika tidak melakukan perbaikan kami memiliki kewenangan melanjutkan ke proses pidana. Tetapi, perusahaan tersebut tetap diberi kesempatan ataupun jangka waktu tertentu terlebih dahulu hingga batas waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Pencabutan IUP perusahaan tambang batu bara itu dilakukan melalui berbagai proses. Pada tahap pertama, setiap perusahaan diberi pembinaan terkait pengelolaan lingkungan namun jika dalam pembinaan itu melakukan pelanggaran maka akan diberikan peringatan namun jika sudah tiga kali diperingatkan tetapi tidak ada perbaikan maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan menghentikan aktivitas perusahaan tersebut. Tetapi penghentian itu juga bisa tanpa peringatan sebelumnya seperti yang diatur dalam UU Nomer 32 tahun 2009 pasal 80 ayat b, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

apabila kerusakan lingkungan sangat parah maka bisa langsung dihentikan aktivitasnya.

---

<sup>14</sup> .Junaidi, Wawancara (kepala geologi pertambangan umum dinas SDM) 21 mei 2012

Jika pada proses penghentian tetap tidak ada upaya perbaikan maka IUP perusahaan tambang batu bara itu akan dicabut, tetapi kewajiban untuk melakukan perbaikan lingkungan yang rusak tetap harus dilakukan. Kemudian setelah arahan dari BLH untuk memperbaiki lingkungan pasca pencabutan tidak dilakukan maka akan dilanjutkan pada proses hukum.

Umumnya, pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan tambang batu bara evaluasi baik air udara maupun B3 (bahan berbahaya dan beracun) kemudian kelengkapan pengelolaan lingkungan di dalam terkait fasilitas TPS (tempat pembuangan sampah), pengelolaan B3 kemudian, `workshop` serta sedimen atau kolam pengendapan.

Setiap bulan pemerintah daerah maupun (BLH) melakukan pengawasan dan pembinaan pada 10 tambang batubara yang ada di kabupaten kuantan singingi. Sebenarnya, pengelolaan lingkungan itu sangat mudah, tinggal kemauan dan komitmen dari perusahaan tambang tersebut dan itulah yang terus awasi, pemda kabupaten kuantan singingi maupun badan lingkungan hidup .

Kepala badan geologi pertambangan umum kabupaten kuantan singingi menjelaskan ada beberapa perusahaan tambang di kabupaten kuantan singingi melakukan pelanggaran. Namun, pemberian sanksinya baru sebatas teguran dan sanksi administrasi, belum sampai pada penutupan serta pencabutan izin tambang<sup>15</sup>.

Dalam kegiatan penambangan batubara terbuka, terdapat tiga komponen kegiatan yang merupakan sumber dampak terhadap komponen lingkungan. Yaitu

---

<sup>15</sup> .Junaidi, Wawancara (kepala geologi pertambangan umum dinasSDM) 21 mei 2012

pada tahap persiapan penambangan, meliputi pembebasan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembersihan lahan serta pembangunan kolam sedimen atau tailing.

### **3. Prosedur penyelesaian sengketa lingkungan usaha kegiatan pertambangan.**

Sengketa lingkungan adalah pencemaran, maka yang harus dibuktikan adalah apakah misalnya limbah air tambang mencemari lahan perkebunan, debu mencemari tempat tinggal, kebisingan sudah diatas ambang batas. Dengan demikian, pihak masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan perusahaan tambang yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini masyarakat yang mengajukan keberatan harus dapat membuktikan bahwa perusahaan tambang bersalah melanggar hak orang lain atau lingkungan hidup atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sesusai dengan paparan dan penjelasan dari warga masyarakat yaitu adanya kerusakan lingkungan seperti, adanya pencemaran Air, yang membuat air keruh dan tidak bisa digunakan, polusi udara, dan kurangnya penanaman hutan kembali (Reboisasi) setelah usaha kegiatan pertambangan selesai. Adapun tindakan yang dilakukan warga adalah dengan meraka bermusyawarah dengan Perusahaan agar kerusakan yang terjadi dibenahi, seta mengganti Rugi hal-hal yang merugikan lahan Masyarakat dan tempat tinggal. Dan apabila pihak perusahaan tidak mau musyawarah dan ganti Rugi Maka warga setempat

melaporkan kepihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan selanjutnya pihak yang berwajib<sup>16</sup>.

Badan lingkungan hidup kabupaten Kuantan singingi menjelaskan Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mengetahui terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan adalah melalui pengujian sampel dan atau pemeriksaan fakta lapangan dengan mengacu pada kriteria-kriteria baku mutu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dari hasil pengamatan dilapangan bentuk kerusakan yang paling parah adalah, adanya kerusakan lahan yang tidak dilakukan penimbunan kembali tanah pasca tambang dan Reboisasi, seterusnya adanya kerusakan aliran sungai yang tercemar, yang mengakibatkan air keruh dan kerusakan lingkungan lainnya, sebaiknya langkah yang harus ditempuh adalah dengan memanggil pihak perusahaan dan mengintruksikan agar lingkungan di perbaiki, apabila pihak pertambangan tidak mau memperbaiki maka tindakan tegas yang diambil BLH adalah bekerja sama dengan warga masyarakat, dengan melaporkan Kepihak Pemerintah Daerah dan selnjutnya di teruskan ke pihak yang berwajib yaitu Polisi, yang akan memberikan sanksi.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan dinas sumber daya mineral kabupaten kuantan singingi kepala geologi pertambangan umum, dengan mengajukan pertanyaan

Bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan apabila terjadi masalah yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan?

---

<sup>16</sup> Kombaruddin, Wawancara(Warga / tokoh Masyarakat) 1 juni 2012

<sup>17</sup> Asmari, Wawancara (Badan lingkungan hidup) 28 mei 2012

Jawaban Narasumber yaitu Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan (Pasal 31 UUPH). Penyelesaian sengketa ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga netral, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan (Arbitrase) maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (Mediasi dan Konsiliasi), untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan.<sup>18</sup>

Terdapatnya rumusan dapat dan “membantu penyelesaian konflik lingkungan di luar pengadilan tidak harus menggunakan jasa pihak ketiga (netral), baik mediasi maupun arbitrase, tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa (Negosiasi). Penggunaan jasa pihak ketiga tergantung pada kebutuhan para pihak yang bersengketa.

Pemerintah atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan.

Penyelesaian melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana diatur dalam BW dengan mendalilkan Pasal 1365 BW.

---

<sup>18</sup> Junaidi, Wawancara (kepala geologi pertambangan umum dinas SDM) 21 mei 2012



Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur oleh pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>19</sup>

Dalam kasus-kasus bentuk penyelesaian sengketa lingkungan umumnya dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini dilakukan Dinas Lingkungan. Dalam kaitan ini apakah Pemerintah Kabupaten dapat bertindak sebagai mediasi.

Menurut pendapat penulis Pemerintah Kabupaten secara hukum mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan karna pemerintah kabupaten lah yang harus bertanggung jawab dalam pengwasan lingkungan hidup, dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara biasa. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada Pemerintah membawa dampak terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Secara kelembagaan masing-masing dibentuk instansi yang mengelola lingkungan dengan kewenangannya.

Salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan lingkungan jika terjadi pencemaran yang diatur dalam Pasal 25 UU Lingkungan Hidup, yaitu :

1. *Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.*

---

<sup>19</sup> *Op.cit*

2. *Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/madya/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.*
3. *Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
4. *Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.*
5. *Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan "pembayaran sejumlah uang tertentu."<sup>20</sup>*

Pasal 25 UUPLH di atas memberikan dasar wewenang kepada Bupati untuk menjatuhkan sanksi administrasi, misalnya kepada suatu perusahaan tambang dalam hal telah terjadi dan terbukti melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan adanya paksaan pemerintahan ini, diharapkan perusahaan tambang dapat mengambil tindakan :

1. mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan ;
2. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan atas beban biaya sendiri perusahaan tambang. Sebagai penggantinya perusahaan tambang dapat melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

---

<sup>20</sup> Pasal 25 Undang-Undang Lingkungan Hidup

Di samping penjatuhan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pejabat yang berwenang juga dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ini akan dilakukan jika pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan menimbulkan korban, keresahan masyarakat atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam kaitan ini Pasal 27 UUPH menyatakan :

1. *Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.*
2. *Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.<sup>21</sup>*

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan negara.

---

<sup>21</sup> Pasal 27 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan batubara Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai UU No 04 tahun 2009 karena dalam pemberian izin tambang batubara Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat karena kurangnya sosialisasi terhadap Badan usaha (Perusahaan batubara), koperasi, perorangan maupun masyarakat. Setiap instansi yang ingin melakukan kegiatan pertambangan hanya mengetahui kewajibannya dan mereka tidak mengetahui semua Haknya, karena setiap pelaksanaan dan izin harus sesuai dengan Undang-Undang dan pengawasan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Tanpa memberikan keterangan tentang hak yang didapat dan yang mereka ketahui hanya tentang berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar izin pertambangan batubara, sedangkan hak-hak dari pemerintah pusat maupun daerah tidak mereka ketahui, hal inilah merusak lingkungan dan pencemaran lingkungan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009 yaitu para pihak perusahaan kurang mengetahui tentang aturan yang terkandung dalam UU No 4 Tahun 2009 tersebut, kurangnya sosialisasi terhadap UU No 4 Tahun 2009 tersebut sehingga menyebabkan adanya Penambang-Penamang liar seperti yang merusak lingkungan, dan kurangnya kesadaran mentaati peraturan yang

telah dibuat Akibatnya banyak pihak pertambangan yang melakukan pencemaran lingkungan merusak lahan masyarakat tempatan.

3. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak pertambangan adalah kerusakan lingkungan baik sewaktu dimulainya kegiatan pertambangan maupun setelah selesainya kegiatan pertambangan, ini dibuktikan adanya perusahaan batubara yang tidak melakukan perbaikan terhadap lingkungan sekitar.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan pemerintahan khususnya Menteri, Gubernur dan yang paling penting Bupati dan jajarannya dapat melakukan sosialisasi terhadap setiap Undang-Undang ataupun Perda yang dikeluarkan kepada masyarakat agar dapat menekan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kontribusi dibidang perizinan dapat diterima secara maksimal dan meningkatkan pendapatan dari perizinan pertambangan.
2. Kepada para perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan dan mengurus izin diharapkan agar dapat membayar berapa nominal yang harus dibayar sesuai dengan Undang-Undang. karena setiap yang perusahaan yang tidak membayar pajak maupun sumbangan sebelum melakukan kegiatan pertambangan atau pun yang sedang melakukan dan tidak membayar biaya perizinan sesuai Undang-Undang maka akan dikenakan sanksi administrasi dan yang paling berat adalah sanksi pidana.
3. Diharapkan setiap perusahaan yang mau mendirikan perusahaan pertambangan, baik yang sedang berjalan maupun penutupan, agar memperhatikan dampak lingkungan di setiap areal lokasi pertambangan,

begitu juga pemerintah setempat agar selalu mengawasi aktivitas pertambangan, supaya tidak terjadi lagi perselisihan antara warga dengan pihak pertambangan maupun perselisihan dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al. Marsudi, *pancasila dan UUD 45 dalam paradigma Reformasi* , (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003)
- Abrar saleng, *hukum pertambangan*, (Yogyakarta,UUI Press, 2004)
- AP, Perlindungan *,Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Mandar Maju, Bandung 1989)
- Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Kegiatan Tertentu*, (Liberti,Yogyakarta, 1998)
- Handri rahardjo, *hukum perizinan*, (Yogyakarta Pustaka Yustitusia, 2009)
- Marihot P.Siahaan, *Pajak Dan Retribusi Daerah* (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2005)
- Mashuri, *Pencemran Lingkungan Akibat Pertambangan*, (Yogyakarta: Pustaka Salistra, 2010).
- Memet Nurachmat, *lingkungan social dan ilmu bumi* (Jakarta, Lazuardi Putra Pertiwi, 1997)
- Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modren*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1986)
- Nandang Sudrajat, *Teori dan praktek pertambangan Indonesia menurut hukum*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010)
- Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang retribusi izin usaha pertambangan dan energi.
- Soehino, *ilmu negara*, (Jakarta, Liberty, 2005)
- Soerjono soekanto, *suatu tinjauan sosiologi hukum terhadap masalah masalah sosial*, (Bandung, Alumni, 1981 ),
- Sukandarrumidi, *Bahan galian industri*, (Yogyakarta, Gajah mada university press, 1999)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2000)  
Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 Tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan.

Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997

Widjaya, HAW, *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*, (Jakarta, pt. Raja Grafindo Persada, 2007)

Zainuddin ali, M.A, Dr, Prof, *kesadaran hukum dalam sosiologi hukum*, ( Jakarta sinar grafika 2007),